



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN AMPANG RIWO SUROMANDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SUKRY
2. Jabatan : KEPALA UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN AMPANG RIWO SUROMANDI
3. NHK : 443559

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA DOMPU, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 875.750.000

III. HUTANG Rp. 290.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 585.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.